

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, maka dikenal ada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum serta didasarkan pada hak-hak perseorangan.

Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara hukum, di dalamnya terkandung pengertian tentang adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹

¹ I Dewa Gede Atmadja, **Demokrasi, HAM & Konstitusi**, Malang: Setara Press, 2011, hlm. 178.

A.V Dicey membagi pengertian *rule of law* dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu secara formil dan secara materiil. Secara formil, diartikan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, dalam hal ini berarti setiap kaidah-kaidah yang didasarkan pada hirarki pemerintah, sedangkan secara materiil adalah mencakup ukuran tentang hukum yang baik, yang dapat dilihat dari beberapa hal di antaranya:²

1. Ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintahan, dalam hal ini badan legislatif, eksekutif dan yudikatif;
2. Aturan-aturan yang sejalan dengan HAM;
3. Negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi sosial demi mewujudkan aspirasi masyarakat dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia;
4. Adanya prosedur yang jelas dalam proses memperoleh keadilan dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang;
5. Lembaga yudikatif yang *independent* sebagai lembaga yang berfungsi untuk memeriksa serta memperbaiki tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari lembaga eksekutif maupun legislatif.

Selain itu prinsip-prinsip di atas, yang menjadi ciri khas dari suatu Negara hukum adalah penegakan hukum.³ **Nyoman Serikat Putra Jaya**, mengartikan penegakan hukum sebagai “perhatian dan penggarapan”, terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dan perbuatan hukum yang akan terjadi dikemudian hari, sehingga dalam penegakan hukum, tidak hanya melihat persoalan bagaimana hukum

² Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus**, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 129

³ Bambang Sutiyoso, **Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 57-67

diterapkan, melainkan juga pembentukan hukum.⁴ Hal tersebut sesuai dengan Teori Pembentukan Hukum yang diungkapkan oleh Hans Kelsen, bahwa pembentukan hukum adalah rangkaian awal dari penegakan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan.⁵

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, ada 2 bentuk kepastian hukum, yaitu:⁶

- a. Kepastian dalam hukum, di maksudkan agar norma-norma hukum dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan di dalamnya harus tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat dilihat perilaku masyarakat yang patuh dan tidak patuh, dan
- b. Kepastian karena hukum, di maksudkan bahwa kepastian dapat tercipta karena hukum itu sendiri.

Pada praktiknya, kepastian hukum lebih identik dengan peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sempurna. Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat oleh Lembaga Legislatif yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang berasal dari partai politik, sehingga beberapa produk peraturan perundang-undang yang dibentuk, di dalamnya mengandung norma-norma yang menguntungkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, artinya, undang-undang tidak selamanya dapat mencakup dan memenuhi

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, **Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 52

⁵ Hans Kelsen, **Teori Umum Hukum dan Negara**, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 163.

⁶ Bambang Semedi, **Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum**, W.I pada Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013, hlm. 4

kebutuhan masyarakat, sehingga masih banyak undang-undang yang berlaku di Indonesia yang dalam pelaksanaannya belum ada pengaturannya, atau sudah diatur tetapi tidak jelas, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, bahkan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan.

Penegakan hukum yang berkeadilan erat kaitannya dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar.⁷ Di Indonesia hukum pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum pidana formil dan materiil. Hukum pidana materiil di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hukum pidana secara umum dan juga tersebar dalam berbagai Undang-undang yang membahas tentang hal-hal tertentu. Pelanggaran terhadap hukum pidana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam atau diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau perbuatan pelanggaran.⁸

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam suatu kesatuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana

⁷ Moeljatno, **Asas – Asas Hukum Pidana**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 8.

⁸ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 3.

ini berkaitan dengan kesamaan prosedur (sub-sistem peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/ditentukan di dalam undang-undang), persepsi (adanya pemahaman/pengetahuan yang sama antara sub-sub sistem terhadap perkara/kasus yang ada, dan tujuan (sub-sub sistem peradilan pidana harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima masyarakat).

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu komponen peradilan pidana yang saling terkait satu sama lainnya dan bekerja untuk mencapai tujuan yaitu guna menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat.⁹

Dalam sistem peradilan pidana (*integrated justice system*) terdapat komponen atau lembaga yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁰ Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk

⁹ Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hlm. 1.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹¹

Adapun yang dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.¹²

Walau istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya konferensi Bina Direktorat

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, **Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan**, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, hlm 2.

¹² Ibid.

Pemasyarakatan di Lembang Bandung, Jawa Barat tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat di mana seorang yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya.¹³

Pergantian nama rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan juga diikuti dengan perubahan fungsinya yakni menjadi tempat bukan untuk semata mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mengayomi serta memasyarakatkan orang-orang terpidana agar mereka itu setelah selesai menjalani pidananya, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan dan sebutan “rumah penjara” telah berganti menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” akan tetapi di dalam praktiknya ternyata Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara tidak didukung dengan sarana yang diperlukan dan bahkan perangkat peraturan gagasan yang merupakan landasan

¹³ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman*, (Bandung: Sukamiskin, 1964), Hal. 32.

operasional dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mengayomi serta memasyarakatkan para warga binaan.

Kota Malang dengan jumlah tindak pidana mencapai total 1.391 pada tahun 2018, menurun dari sebelumnya pada tahun 2017 mencapai total 2.592 laporan.¹⁴ Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum pidana di Kota Malang, terdapat komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang saling berpengaruh. Penegakan hukum pidana berjalan mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), mulai dari status tersangka hingga menjadi narapidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵ Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.¹⁶ Demikian halnya dengan kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang sangat diharapkan peran sertanya di dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan.

Dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pengayoman;

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kota Malang, **Kota Malang Dalam Angka 2019**, BPS Kota Malang, Malang, 2019, hlm. 193.

¹⁵ Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan.

¹⁶ Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan.

- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;*
- c. pendidikan;*
- d. pembimbingan;*
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;*
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan*
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.*

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam Pasal 12 ayat (2) UU Pemasyarakatan, disebutkan bahwa “Pembinaan Narapidana Perempuan di Lapas dilaksanakan di Lapas Perempuan”. Di Kota Malang, terdapat Lapas Perempuan yaitu Lapas Perempuan Kelas II A Malang yang pada Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 197 warga binaan Lapas mendapatkan remisi.¹⁷

Lapas Perempuan Kelas II A Malang terdapat warga binaan sebanyak 506 dan tahanan sebanyak 63 orang. Dari jumlah 506, sebanyak 390 orang merupakan warga binaan yang terseret tindak pidana khusus dan yang terlibat pidana umum sebanyak 179 orang. Sedangkan warga binaan yang berstatus Warga Negara Asing sebanyak 13 orang.¹⁸ Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam dalam penelitian skripsi dengan

¹⁷ Pemerintah Kota Malang, **197 Warga Binaan Lapas Wanita Kelas IIA Dapatkan Remisi**, (Online), Pemerintah Kota Malang, 2017, diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

¹⁸ Ibid.

judul: **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang?
3. Bagaimana solusi pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberi arah dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian skripsi ini dapat berguna dan memiliki kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana.
- b. Menjadi masukan untuk pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana tentang Pemasyarakatan.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam menerapkan hukum pidana khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan untuk menjadi rujukan solusi pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat terkait pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan untuk memastikan tidak adanya kegiatan plagiat atau mencontek dalam penulisan Skripsi ini adalah akan disebutkan dalam tabel yang disajikan oleh penulis dibawah ini:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Asal Perguruan Tinggi	Judul	Keterangan
1	Rita Pristiwati (2009)	Universitas Sumatera Utara	<i>"Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tanjung Gusta Medan"</i>	Persamaan penelitian skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada objek penelitian

				<p>yaitu pembinaan narapidana Perbedaan penelitian skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada skripsi ini mengkaji secara khusus pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.</p>
2	Nuri Isnawati (2016)	Universitas Lampung	<p>Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA KotaBumi)</p>	<p>Persamaan penelitian skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada objek penelitian yaitu pembinaan narapidana Perbedaan penelitian skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan oleh</p>

				penulis adalah pada skripsi ini mengkaji secara khusus pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.
--	--	--	--	---

Sumber: Bahan Hukum Sekunder (Diolah: 2020)

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang bersifat ilmiah berkaitan dengan analisis serta konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi dilakukan menggunakan cara tertentu yang sesuai dan sistematis berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi memiliki arti tidak adanya berbagai hal yang dapat bertentangan dengan kerangka tertentu.¹⁹

Penelitian hukum adalah kegiatan dalam mencari serta menemukan berbagai pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang di kemudian hari dapat menjawab dan memecahkan masalah hukum dengan benar. Cara untuk mencari dan menemukan berbagai pengetahuan adalah dengan metode.²⁰ Metode penelitian yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan yang mempunyai identitasnya sendiri-sendiri, selalu disesuaikan dengan ilmu

¹⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), Hal. 42.

²⁰ M. Syamsudin, **Oprasionalitas Penelitian Hukum**, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), Hal. 21.

pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²¹ Karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu, yaitu penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang khususnya terkait pembinaan narapidana Perempuan. Pada penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena pendekatan ini menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.²² Kemudian pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²³

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan

²¹ Silalahi, **Metode Penelitian Sosial**, (Bandung : Refika Aditama, 2009), Hal. 10.

²² Ashshofa Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), Hal. 16.

²³ Soerjono Soekanto, *Op,Cit*, Hal. 51.

jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu khususnya dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang. Dengan pendekatan penelitian ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka lokasi penelitian oleh penulis tentukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang. Alasan dipilihnya lokasi tersebut yaitu terdapat warga binaan sebanyak 506 dan tahanan sebanyak 63 orang. Dari Jumlah 506, terdiri dari 390 merupakan warga binaan yang terseret tindak pidana khusus dan yang terlibat pidana umum sebanyak 179 orang. Sedangkan warga binaan yang berstatus Warga Negara Asing sebanyak 13 orang.²⁴

4. Jenis dan Sumber Data

Data sebagai sumber referensi dalam penulisan Skripsi ini bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan menyampaikan daftar pertanyaan kepada subyek penelitian.

b. Data Sekunder

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²⁴ Ibid.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Referensi hukum : buku, jurnal, artikel dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Data Primer dilakukan dengan :

- 1) Observasi dan pengamatan disertai pencatatan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap objek yang ingin diteliti. Maka dengan suatu objek masalah yang diteliti pengamatan dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat yang menjadi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.
- 2) Wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab terhadap responden tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.
- 3) Daftar Pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden penelitian tentang permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui:

1. Studi kepustakaan (*Bibliography Study*)

Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan case yang menjadi objek untuk diteliti dalam skripsi ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dianalisis dan juga melalui internet,

majalah, dan melalui kamus bahasa, kamus-kamus hukum dan sumber referensi kamus berkaitan dengan problem yang menjadi objek riset dalam skripsi ini.

2. Studi Dokumentasi (*Document Study*)

Studi Dokumentasi adalah dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen resmi pemerintah yang berupa peraturan pemerintah, dan dokumen kearsipan yang dapat mendukung bahan penunjang riset pembuatan skripsi.

6. Teknik Populasi dan Sampling

Metode sample yang digunakan oleh peneliti yaitu metode “*random sampling*”, dengan teknik *purposive sampling*, yaitu proses penarikan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan penelitian. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Sehingga populasi dalam penelitian skripsi ini adalah seluruh Petugas yang berwenang dalam melakukan pembinaan narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.

7. Teknik Analisa Data

Data yang didapat dari observasi di lapangan atau dari riset studi referensi buku akan dianalisis. Metode analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif, data diperoleh baik dari peneliti lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan dengan case yang menjadi objek penelitian berdasarkan

ukuran kualitas dan kebenaran untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.²⁵

Metode Analisa yang akan diterapkan gunakan dari bahan yang diterapkan pada penulisan skripsi ini adalah deskripsi Kualitatif. Yaitu bahan yang telah didapat dikualitatifkan artinya bahan tersebut dianalisis dengan menjelaskan isi dan maksud dari bahan yang berasal dari pengumpulan bahan data, kemudian dianalisis dan dijelaskan kembali sesuai dengan bahan yang didapat dari referensi kepustakaan yang sudah dikaji serta bahan yang didapat dari observasi di lapangan, dengan maksud bahan yang didapat dituangkan secara deskripsi pada penulisan kalimat yang tepat, logis dan sistematis, sehingga tidak berpotensi muncul multi tafsir, dan kemudian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

8. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang”, maka definisi yang perlu dijelaskan yaitu:

- a) Pelaksanaan

²⁵*Ibid.* Hal. 91-92.

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan. Dalam penelitian ini pelaksanaan kaitannya mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan.

b) Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

c) Narapidana Perempuan

Narapidana Perempuan adalah terpidana Perempuan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas Perempuan.

d) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Narapidana.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian skripsi yaitu teori efektifitas hukum, teori

pemidanaan, kajian tentang pembinaan, kajian tentang narapidana Perempuan dan kajian tentang lembaga pemasyarakatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan inti dari penelitian skripsi ini. Dalam bab ini diuraikan analisis penulis terhadap hasil penelitian mulai dari permasalahan pertama mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan, kemudian menguraikan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan, dan terakhir penulis memberikan solusi atas hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan yang dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan atau instansi terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran, yaitu kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil kajian pembahasan penelitian yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini

